

ABSTRAK

PERAN NOTARIS/PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA

Kewajiban dalam melaksanakan *wasiat wajibah* itu bersifat *Qadhai*, disini dapat diartikan bahwa tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perintah agama, namun *wasiat wajibah* tersebut dapat dipaksakan apabila ia lalai dalam melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan umum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif mengenai peran Notaris/PPAT dalam membuat akta pembagian harta warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang didukung data lapangan melalui observasi.

Peran Notaris/PPAT dalam membuat akta pembagian harta waris terhadap ahli waris non muslim yakni dengan membuat Akta Keterangan Waris yang di dalamnya menjelaskan pemberiannya melalui *wasiat wajibah*. Demikian pula yang menjadi landasan yuridis atas pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 368 K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998 yang telah menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang beragama Nasrani berhak pula mendapat harta warisan pewaris, tidak melalui warisan melainkan melalui *wasiat wajibah*. Dan besar perolehannya adalah sama dengan bagian seorang anak perempuan, bukan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dan bukan pula $\frac{3}{4}$ bagian dari perolehan anak perempuan pewaris. Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/AG/1999, tanggal 29 September 1999 yang telah memberikan pertimbangan: “Menimbang, bahwa namun dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki, karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai ahli waris non muslim, mereka berhak mendapat warisan melalui *wasiat wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris muslim.” Adapun yang menjadi kelemahan Notaris/PPAT dalam kasus ini yakni kurangnya pemahaman dalam konteks *wasiat wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama atau non muslim, sehingga perlu bagi Notaris/PPAT untuk melakukan perbaharuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kewarisan.

Kata Kunci : Notaris, Wasiat Wajibah, Non Muslim.

ABSTRACT

THE ROLE OF NOTARIS/PPAT IN THE MAKING OF ACTIVITIES OF LEGAL PROPERTY TOWARDS A DIFFERENT AUTHOR INTERRUPTION

Obligation in carrying out the mandate is Qadhai, here it can be interpreted that not only as a person's responsibility in carrying out religious orders, but the will is compulsory if he neglects in carrying it out because it is related to the public interest.

This research is a normative legal research about the role of Notary / PPAT in making deed of dividing of inheritance to different heirs of religion. This study uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study, supported by field data through observation.

Notary's role in making the deed of dividing the heirs against non-Muslim heirs by making the Deed of Inheritance Statement which in it explains its grant through the mandatory testament. Likewise, the juridical basis for the provision of a mandatory will to non-Muslim heirs by the Supreme Court Decision Number 368 K / AG / 1995, dated July 16, 1998 which has stipulated that a Christian girl is entitled to also get the inheritance, not through inheritance but through a mandatory will. And the gains are equal to the share of a daughter, not 1/3 of the estate and not the part of the acquisition of the daughter of the testator. Furthermore, the Supreme Court Decision Number 51 / K / 1999 dated 29 September 1999 has given consideration: "Considering that, however, the Supreme Court is of the opinion that the decision of the Yogyakarta High Religious Court must be improved, since the Religious High Court of Yogyakarta should have improved the amar the decision of the Religious Court of Yogyakarta concerning the non-Muslim heirs, they are entitled to inheritance through a mandatory testament whose content is equal to that of the Muslim heirs". As for the weakness of Notary / PPAT in this case that is lack of understanding in the context of mandatory testament for heirs of different religions or non-Muslims, so it is necessary for Notary / PPAT to make renewal of science, especially in the field of inheritance.

Keyword : Notary, Mandatory Testament, Non-Muslim.